

Book Review

Ziarah Pangan, Ziarah Definisi: Review “50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur” Oleh Lassa dkk, Penerbit PT Timor Media Grafika, 320 hal.

Patricius Usfomeny^(a)

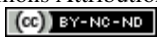
(a) Anggota Forum Academia NTT

Email: patris_usfomeny@yahoo.com

Permanent link of this article: <http://ntt-academia.org/nttstudies/Usfomeny2009.pdf>

The Interdisciplinary Journal of NTT Development Studies - An International Bilingual Journal

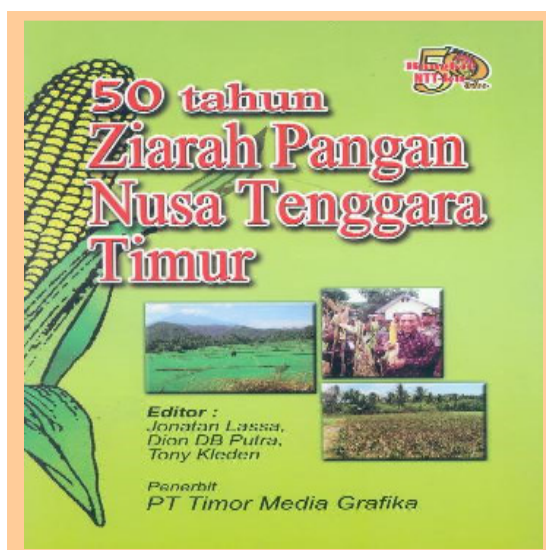
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution

License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode>) License: 

Sekitar Maret 2007, berlangsung satu diskusi kelompok terfokus di Maumere dan Ende, ketika persoalan rawan pangan mengemuka lagi walau tidak sehebat dua tahun sebelumnya.

Di Maumere, diskusi melibatkan Serikat Petani Sikka dan Sanres, sementara di Ende hadir beberapa anggota Konsorsium Pengembangan Dataran Nusa

Tenggara. Diskusi informal tersebut coba menjawab apa yang sebetulnya terjadi, merespons pemberitaan media NTT dan nasional tentang rawan pangan.



Dari soal tingkat keparahan rawan pangan saat itu, kemampuan masyarakat keluar dari kondisi tersebut, soal tindakan paling tepat yang harus dilakukan pemerintah, diskusi akhirnya mengerucut ke apa sebenarnya penyebab rawan pangan di NTT yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Yang menarik, di ujung diskusi bermunculan beberapa pandangan ‘baru’ yang nyaris luput dalam diskursus pangan dan sistem pertanian. Kecendrungan menyalahkan alam, seperti kekeringan panjang, bukan lagi menyita perhatian sebagai penyebab tunggal. Juga bukan semata menyalahkan masyarakat (petani) dengan praktek bercocok tanamnya yang dikatakan tidak selaras alam.

Ada banyak soal di situ. Salah satunya adalah politik pertanian. Pada aras nasional dikritisi upaya mencapai swasembada pangan (beras) yang tidak menjamin ketersediaan di tingkat rumah tangga, hingga aras lokal semisal pola monokultur yang diterapkan oleh banyak petani di Flores. Sejak tiga dekade lalu, pola monokultur dianjurkan pemerintah daerah dan diterapkan petani. Ternyata pola ini secara signifikan telah menggeser lahan untuk tanaman pangan menjadi lahan untuk tanaman perdagangan, seperti kakao, cengkeh dan mete. Petani di Flores Timur, Ende dan Sikka, contohnya, menjadi begitu berorientasi pasar dan secara tidak langsung mengurangi produksi tanaman pangan. Hasilnya, ketika produksi dan harga komoditas perdagangan tersebut jatuh, pendapatan petani pun menurun drastis, yang menurunkan kemampuan mereka membeli pangan.

Kebijakan tata guna lahan pun disoroti. Topografi lahan sebenarnya bisa membantu memetakan fungsinya, dimana ada tiga kategori: lahan untuk tanaman pangan, lahan untuk tanaman perdagangan/tanaman keras, serta kawasan hutan. Dalam prakteknya, didorong oleh orientasi pasar yang tinggi, petani dianjurkan menanam lahannya dengan tanaman perdagangan, termasuk di lahan yang sebenarnya lebih cocok untuk tanaman pangan.

Ragam pendekatan

Mengacu ke konsep *entitlement*-nya Amartya Sen, diskusi di atas baru menyentuh basis produksi dari empat basis kepemilikan yang menjamin pangan. Tiga lainnya adalah dagang, tenaga kerja, dan transfer. Dari sisi pendekatan isu, hanya satu pendekatan yang disorot, yakni politik pertanian. Sementara ragam pendekatan dalam diskursus ketahanan pangan konteks NTT begitu kompleks. Diskusi di atas hanyalah satu dari sekian banyak arena perdebatan serupa yang berupaya mendefinisikan (lagi) rawan pangan di NTT.

Inilah yang ingin ditangkap buku “50 Tahun Ziarah Pangan Nusa Tenggara Timur”. Buku yang diterbitkan PT Timor Media Grafika ini ingin menjawab apa sebetulnya masalah pangan di NTT, didekati dari berbagai sudut. Karena itu buku ini bisa mengisi celah referensi diskursus ketahanan pangan, dari kebutuhan yang paling dasar: menemukan definisi yang pas akibat ketiadaan kesamaan pandangan dalam menyikapi ketidakamanan pangan di antara berbagai aktor.

Ya, ternyata setelah 50 tahun, kita masih belum selesai dengan proses mendefinisikan masalah ketahanan pangan di propinsi tercinta NTT. Setidaknya hal ini diwakili oleh beberapa tulisan yang berusaha mendefinisikan kembali diskursus ketahanan pangan dari berbagai sudut. Sebut saja *Kelaparan dan Kemiskinan Kultural di NTT* (Anton Hagul); *Masihkah Pejabat Kita Punya Kepekaan* (JB Kleden); *Tsunami Kelaparan* (Max Regus); *Rawan Pangan, Rawan Eufemisme – Tentang Bencana Gagal Panen di Sikka* (Paul Budi Kleden); *Mencermati Rawan Pangan di Sikka* (Paternus Yandinatus); *Ketahanan Pangan Ciptakan Suatu Pergeseran Paradigma* (Viator Parera); *Busung Lapar dan Kegagalan Negara* (Steph Tupen Witin); *Tanam untuk Makan – Refleksi Tuntutan Petani untuk NTT* (Fary Dj Francis). Intisari salah satu Pengantar: *Keamanan Pangan dalam Perspektif Komunitas yang Mengalami Kelaparan – Pemetaan Pangan Partisipatif di NTT 2003-2008* (Jonatan Lassa, Yus Nakmofa, Yos Boli), juga masih berkisar soal mendefinisikan ketidakamanan pangan.

Ketahanan versus ketersediaan

Salah satu sumbangan penting buku ini adalah pada konsepsi ketahanan pangan versus ketersediaan pangan. Pengantar Pertama (Jonatan Lassa) lewat penelusuran teoritik memberikan deskripsi yang cukup komprehensif. Disebutkan, ada hubungan yg tidak linear antara ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Sebagai contoh, ketersediaan pangan tahun 2002 tidak menjamin tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang memadai (hal.1). Ketahanan pangan bukan persoalan produksi semata tetapi lebih soal manajemen investasi pada sektor-sektor non pangan dan non pertanian sebagai bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan (hal. 15).

Konsep *entitlements* (Amartya Sen) kemudian dipakai Lassa untuk lebih menjelaskan hal tersebut, sekaligus mematahkan pandangan kalangan *mainstream* (pemerintah dan universitas) yang masih terkurung dalam paradigma *maltusian*. Ketidakamanan pangan oleh kelompok ini masih dilihat sekadar dari aspek ketersediaan produksi pangan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk.

Karena itu, penghidupan berbasis *subsisten* (makan dari produksi sendiri) seolah tidak bisa lagi diandalkan. Diversifikasi sumber penghidupan diyakini bisa membantu petani dan masyarakat NTT bertahan dalam menghadapi sumberdaya alam yang terbatas. Perlu ada pemaduan strategi penghidupan berbasis sumberdaya alam (SDA) seperti pertanian, peternakan, perikanan, komoditas, hasil hutan non kayu, tanaman perdagangan lainnya, serta aktivitas non-SDA (perdagangan, jasa, industri dan manufaktur, dan transfer), sehingga akan berdampak pada keamanan penghidupan seperti tingkat pendapatan yang stabil, kurangnya risiko serta keberlanjutan ekologis (hal.3).

Beras versus jagung

Dalam beberapa kali diskusi dengan para pegiat LSM di NTT, misalnya dengan PMPB Kupang, keluar kritik soal 'kebijakan *berasisasi*' yang sangat sarat muatan politisnya. Kritik ini pun ditangkap dengan baik dalam buku ini. Beras telah didorong menjadi sumber pangan dominan. Indikasinya, ketersediaan beras di gudang Bulog sering dijadikan basis ketahanan pangan di level propinsi dan kabupaten. Beras pun 'dibabtis' menjadi barometer ekonomi pembangunan. Dampaknya sungguh dahsyat: beras menempati 50% total konsumsi nasional; 96% penduduk Indonesia makan beras ketimbang sumber pangan lainnya; dan daerah-daerah seperti Timor, Maluku, Papua dan Kalimantan pun mengalami ketergantungan tinggi pada beras (hal.12). Maka ketika kondisi ketidakamanan pangan terjadi, yang sesungguhnya mengemuka adalah soal defisit beras dan bukan defisit ketersediaan karbohidrat.

Pada paradoks yang lain, jagung yang dari daya dukung alam demikian pula secara etnologis telah menjadi tumpuan mayoritas masyarakat NTT lebih dari tiga abad, ternyata belum mendapat perhatian yang selayaknya dalam kebijakan pertanian di NTT. Karena itu buku ini mendorong perlunya kebijakan untuk membebaskan NTT dari jeratan komoditas yang tidak berkelanjutan (hal. 7).

Hal inilah yang membuat buku ini berbeda dari banyak tulisan tentang pangan di NTT yang terjebak dalam stigma menyalahkan masyarakat sebagai penyebab ketidakamanan pangan, setelah kepayahan menyalahkan alam. Contoh tulisan yang membawa nafas ini: *Rawan Pangan Rawan Eufemisme* (Paul Budi Kleden); *Dicari Bintang Pembangunan NTT* (Leta Rafael Levis); *Tanam Untuk Makan* (Fary Dj. Francis); *Ole-Ole dari Desa* (Leta Rafael Levis); *Gizi Buruk dan Tanggung Jawab Gereja* (Pdt. Mery Kolimon).

Kaya perspektif vs taat tema

Harus diakui, buku ini telah berhasil mengumpulkan mozaik-mozaik pemikiran tentang persoalan pangan di NTT dalam beberapa tahun belakangan. Pemilihan judul 'ziarah pangan' pun terasa pas, merefleksikan panjang dan pekatnya persoalan pangan tersebut. Namun satu hal yang sedikit mengganjal, tidak ditemukan alasan penggunaan periodisasi 50 tahun sebagai 'pagar waktu' untuk membantu penelusuran diskursus pangan NTT, karena nyaris semua artikel yang ada berseting tahun 1997 hingga 2008. Apakah hanya mengikuti saat lahirnya NTT? Sementara nyaris semua tulisan/artikel tersebut semacam respons atas kondisi ketika tulisan itu dibuat.

Tebaran tulisan dengan tema pangan yang relatif luas yang coba ditangkap buku ini (dari penulis dengan latar belakang keilmuan dan profesi berbeda) pun menunjukkan suatu kekayaan perspektif. Ini membantu kita untuk tidak lagi terjebak dalam menjadikan kekeringan sebagai kambing hitam, yang lebih banyak muncul dari para pengambil kebijakan untuk menyembunyikan kegagalan melahirkan kebijakan pangan yang mumpuni (hal.1).

Tetapi harus diakui, pada saat yang sama, pemilihan tulisan ternyata tidak selalu taat tema. Ada beberapa tulisan yang sebenarnya kurang sesuai dengan tema pokok buku ini. *Irak dan Sejumpt Beras* (John Mansford), sebagai contoh, sangat lugas dan persuasif memaparkan persoalan yang ada kaitannya dengan pangan (beras), tetapi konteksnya adalah perang Irak, jelas sangat jauh dari konteks persoalan pangan di NTT. Simak juga tulisan *Perihal Makan dan Apa yang Dimakan* (Pius Rengka), awalnya secara menarik menyoal pergeseran perilaku konsumtif orang NTT dalam pemenuhan kebutuhan paling dasar manusia: makan. Namun porsi terbesar tulisan ini sebenarnya semacam metafora perihal makan dengan konstelasi politik NTT, sulit dicari padanan isu-nya dalam buku ini. Atau tulisan *Perencanaan Strategis Desa* (Paskalis Nai), jika sepintas diikuti, tulisan ini bisa saja dimasukkan ke dalam ranah kebijakan pangan, dimulai dari aras desa yang notabene selalu diidentikan sebagai lumbung pangan. Tetapi tulisan ini memang sejak awal sudah didisain oleh penulisnya untuk berargumentasi khusus tentang pentingnya suatu perencanaan strategis (renstra) skala desa, dilengkapi dengan soal-soal teknikalitis bagaimana suatu renstra desa yang benar. *Adegan Pembangunan di Tepi Lapangan* (Marsel Robot), sisi

human interest tulisan ini mampu membuat pembaca merefleksikan secara imajinatif akumulasi kesulitan penduduk desa akibat keterbatasan akses terhadap infrastruktur di Manggarai Timur yang mewakili banyak desa di NTT dengan kondisi yang sama. Namun tulisan ini tidak dirangkaikan ke diskursus ketahanan pangan sebagai tema sentral buku ini. Demikian juga beberapa tulisan lainnya, terutama pada BAB II (Kemiskinan dan Bencana di NTT).

Pemilahan tulisan-tulisan dalam dua tema besar: Sumber Pangan (BAB I) dan Kemiskinan dan Bencana di NTT (BAB II) pun terasa 'tiba-tiba', dan agak keluar dari tema sentral buku. Mengapa pemilahan itu tidak dilakukan dalam ranah isu pangan yang banyak disinggung dalam beberapa tulisan terpilih, dan sebenarnya sudah nampak dalam Pengantar (Jonatan Lassa)? Dimana sudah diidentifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti mitigasi kekeringan dan ketahanan pangan, pertanian lahan kering dan ketahanan pangan, pangan dan politik pertanian, dialektika pangan dan tambang, pangan dan pasar, pangan dan iklim, ketahanan pangan dan kemiskinan, politik bantuan pangan, serta gender dan sumberdaya alam.

Bunga rampai

Salah satu keterbatasan (baca: sisi lemah) suatu buku 'bunga-rampai' atau kumpulan tulisan, yaitu menemukan 'benang-merah' yang benar-benar kuat mengikat semua tulisan menjadi satu keutuhan. Apalagi tulisan-tulisan yang ada dikumpulkan dalam rentang waktu yang cukup jauh, dengan *setting* yang berbeda. Peran Pengantar di sini, karena itu, sangat diperlukan untuk menangkap 'benang merah' itu, lantas menjahitnya menjadi satu konsensus berpikir. Pengantar Pertama (Jonatan Lassa), sebenarnya telah memenuhi harapan itu, dibanding Pengantar Kedua (Jonatan Lassa, Yus Nakmofa, Yos Boli) yang secara spesifik hanya memberikan alternatif pendefinisian ketidakamanan pangan, dan Pengantar Ketiga (Viator Parera) yang masih terkesan abstrak.

Sayang, terasa ada *tone* yg berbeda ketika membaca Pengantar Pertama dan Kedua dibanding tulisan-tulisan lainnya. Gaya ilmiah populer sebenarnya sudah dipakai dalam semua Pengantar dengan narasi yang mengalir, tetapi penggunaan tabel, grafik dan *box* (total 16 buah) justru memberi kesan kuat penyajian tulisan tersebut sebagai laporan hasil penelitian.

Satu hal lagi yang terasa mengganjal, tanggal tulisan yang dimuat di Harian Umum Pos Kupang tidak dicantumkan. Padahal ini akan sangat membantu. Tidak ada penjelasan mengapa hal ini tidak dilakukan. Memang pencantuman tanggal akan membantu pembaca dalam kontekstualisasi waktu dan *setting* ketika tulisan itu dibuat. Biasanya opini di surat kabar merupakan respons atas satu isu atau kasus tertentu yang sedang hangat saat itu. Dan karena sifat opini koran yang pendek, langsung dan spesifik, penulis opini cenderung langsung menyampaikan pandangannya atas persoalan tersebut, kadang tanpa penjelasan cukup tentang latar belakang masalah. Hal inilah yang membuat pembaca buku ini harus mereka-reka apa persoalan yang sedang terjadi saat itu.

Begitu banyaknya *gramatical errors* menimbulkan dugaan buku ini belum melewati suatu *gramatical-editing* yang diperlukan. Hal ini cukup mengganggu kenyamanan membaca. Selayaknya untuk edisi berikut (jika ada rencana), sebaiknya ada keterlibatan editor bahasa untuk melakukan pembenahan dari sisi gramatikal, dengan tidak meninggalkan karakter tulisan ilmiah populer yang digunakan dalam buku ini.

Terlepas dari beberapa keterbatasan tadi, buku ini layak menjadi referensi para akademisi, pegiat lembaga swadaya masyarakat, pembuat kebijakan, kalangan dunia usaha, serta semua pihak yang *concern* pada persoalan pangan di NTT. Karena itu terima kasih patut disampaikan kepada Pos Kupang yang telah menerbitkan buku ini, suatu upaya yang perlu diapresiasi dan didukung untuk kelanjutannya di masa-masa mendatang.